



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 195 TAHUN 2023  
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PADANG TAHUN 2023**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/244/DP3AP2KB/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2023.

KEDUA : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2023 meliputi :

- a Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- b Sosialisasi pengarusutamaan gender;
- c Implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

**KETIGA** : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Daerah Kota Padang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi Pengarusutamaan Gender;
- b Penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
- c Instansi terkait, yang memuat instansi instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
- d Kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
- e Ukuran Keberhasilan, yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indicator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan
- f Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.

**KEEMPAT** : Format Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan walikota ini.

**KELIMA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2023.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 04 Maret 2023  
WALI KOTA PADANG,  
  
HENDRI SEPTA

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 145 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN  
 GENDER KOTA PADANG TAHUN 2023

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2023**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
<b>Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah</b>							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<p><b>B03 :</b>                      Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p><b>B06:</b>                      1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)                      2. Advokasi Peraturan/kebijakan tentang PUG yang telah</p>		<p><b>B03 :</b>                      Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)</p> <p><b>B06:</b>                      1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatanganan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah.</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya). 2.Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.
					<b>B09:</b> Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.		<b>B09:</b> Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
					<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	<b>B03 :</b> 1.Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2.Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang		<b>B03 :</b> 1.Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepala Daerah		Berencana (DP3AKB)	kegiatan di Kabupaten/Kota		disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tanda tangan Kepala Daerah dan Stempel)
					<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
					<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -
					<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	BAPPEDA	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	<b>B03 :</b> 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.		<b>B03 :</b> 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.
					<b>B06:</b> Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang memuat substansi :		<b>B06:</b> 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah satu dasar hukum (tetap) atau termuat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		di BAB I 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					<b>B09:</b> Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota		<b>B09:</b> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Tahun 2023 yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I</li> <li>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</li> <li>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</li> <li>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</li> <li>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atau termuat di BAB I</li> <li>3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</li> <li>4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</li> <li>5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</li> <li>6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</li> </ol>
					<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>							
<b>Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	<b>B03 :</b> 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota 2. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota,		<b>B03 :</b> 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, 2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota
					<b>B06:</b> 1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota,		<b>B06:</b> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota,
					<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -
					<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terfasilitasinya Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) pada masing masing OPD Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota	<b>B03:</b> Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota		<b>B03:</b> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota
					<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
					<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09 : -		B09 : -
					B12: -		B12: -

**SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah**

Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, kepala instansi vertical. Anggota DPRD, Lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak	Pemerintah Kota Padang	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Kepala OPD dan Jejaring (DPRD) Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada OPD, Kepala Instansi vertical, anggota DPRD, Lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum dan Lembaga bantuan hukum 2. Tersedianya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi
					B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Kepala OPD Kepala Instansi vertical, anggota DPRD, Lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum		B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
hukum, dan Lembaga bantuan hukum				media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	<b>B09:</b> Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya <b>B12:</b> Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		<b>B09:</b> Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya <b>B12:</b> Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
Inventarisasi/tagging program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Pemerintah Kota Padang	DP3AP2KB	Terinformasinya program dan kegiatan pada masing masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Tersedianya data dan informasi tentang program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender.	B03- B06: B09: ↳ Inventarisir program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program yang dapat dianalisis menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) <b>B12:</b> -		B03: - B06: - B09: ↳ Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) gender <b>B12:</b> -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>							
<b>Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</b>							
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	<b>B03:</b> 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		<b>03:</b> 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
					<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -
					<b>B12:</b> -		<b>B12:</b> -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2023	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	<b>B03:</b> 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  <b>B06:</b> Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  <b>B09:</b> 1. Tercetaknya Buku Profil		<b>B03:</b> 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota  <b>B06:</b> Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul  <b>B09:</b> 1. Softcopy Buku Profil Gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Gender Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota (lengkap) 2. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					<b>B12:</b> Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		<b>B12:</b> Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kota Padang	BPKAD	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2024	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	<b>B03 :</b> -		<b>B03 :</b> -
					<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
					<b>B09 :</b> Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2024		<b>B09 :</b> Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2024

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: -		B12:
		BPKAD	Terakomodirnya a isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2024 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
					B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2024		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA Perubahan tahun 2023 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2023 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2024 ke DPRD
					B12:		B12 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 2. Nota Kesepakatan KUA Perubahan PPAS Tahun 2023 2. Rancangan KUA PPASD Tahun 2024		1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Tahun 2024 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2024
Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsive / Gender Budget Statement (GBS) yang dianalisis menggunakan dan Gender Analysis Pathway (GAP)	Pemerintah Kota Padang	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) (B03)	Terwujudnya program dan kegiatan OPD yang responsive gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	<b>B03:</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota 2. Analisis Program dan kegiatan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas		<b>B03:</b> 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>nasional/ global seperti pencapaian SDG's</p> <p>c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>d. Dalam rangka pencapaian SPM</p> <p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</p> <p>f. inovasi Daerah</p>		<p>tahun 2024 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM</p> <p>6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD</p> <p>7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</p>
					<p><b>B06:</b></p> <p>1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun</p>		<p><b>B06:</b></p> <p>1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</p> <p>2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>2023 pada website resmi pemerintah daerah</p> <p>3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p>		<p>3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</p> <p>4. Print screen menu tanggung “kegiatan yang responsif gender” pada e-planning</p>
					<p><b>B09:</b></p> <p>1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</p>		<p><b>B09:</b></p> <p>1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD</p> <p>2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</p>
					<p><b>B12:</b></p> <p>1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinventarisasinya</p>		<p><b>B12:</b></p> <p>1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Sekretariat PUG		Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kota Padang	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terdatanya Inovasi Daerah dalam prcepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Ditetapkan inovasi daerah terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	<b>B03:</b> Inventarisir Perda, Perbup/Perwako tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir		<b>B03:</b> Scan Perda, Perbup/Perwako tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.
					<b>B06</b>		<b>B06</b>
					<b>B09</b>		<b>B09</b>
					<b>B12</b>		<b>B12</b>
<b>OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>							
<b>Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran</b>							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan	Pemerintah Kota Padang	Inspektorat	1. Tersedianya pedoman review PPRG dan pedoman	1. Tersusunnya pedoman review dan pedoman	<b>B03:</b> 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2023 dalam Program Kerja		<b>B03:</b> 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota			pemeriksaan terhadap implementasi GAP/GBS 2. Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 3. Tersedianya hasil pemeriksaan terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya	pemeriksaan terhadap implementasi GAP/GBS 2. Terlaksananya review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 3. Terlaksananya hasil pemeriksaan terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya	Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) Periode Januari – Maret 2023. 3. Tersusunnya draft pedoman review yang memuat PPRg di kabupaten/Kota		2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode Januari – Maret 2023. 3. Scan draft pedoman review yang memuat PPRG di Kabupaten / Kota.
					<b>B06:</b> 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Ta	<b>B06:</b> 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/ <b>Notadinas</b> , absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode April – Juni 2023 3. Scan pedoman review yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>hun Anggaran 2022) Periode April- Juni 2023</p> <p>3. Terbitnya Pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Koa</p>		
					<p><b>B09:</b></p> <p>1. Pembentukan Tim Review PPRG</p> <p>2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023</p> <p>3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) Periode Juli - September 2023</p>		<p><b>B09:</b></p> <p>1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota</p> <p>2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota</p> <p>3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode Juli - September 2023</p>
					<p><b>B12:</b></p> <p>Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) Periode Oktober - Desember 2023</p>		<p><b>B12:</b></p> <p>Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode Oktober - Desember 2023</p>


  
**WALI KOTA PADANG,**  
**HENDRI SEPTA**